



Dana Aspirasi Menyalahi Mekanisme Anggaran

Dikhawatirkan akan terjadi pembengkakan anggaran belanja.

JAKARTA — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro belum menerima proposal Dewan Perwakilan Rakyat RI perihal pengalokasian pos dana aspirasi. Bambang menyatakan Presiden Joko Widodo pasti akan menolak usulan tersebut karena menyalahi mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Saat dicegat wartawan, Bambang berkali-kali menolak mengomentari tentang "gentong babi" anggota parlemen tersebut. "Saya belum bisa ngomong apa-apa karena proposalnya belum ada," kata Bambang setelah menghadiri Sidang Paripurna DPR RI, kemarin.

Ia juga tidak mau menjawab apakah ruang fiskal yang ada mencukupi untuk membiayai permintaan DPR sebesar Rp 11,2 triliun itu. Bambang menilai pembicaraan mengenai dana aspirasi tersebut baru kesepakatan di internal DPR dua hari lalu. Pemerintah, kata dia, belum bisa mencampuri urusan tersebut sebelum ada proposal resmi.

Seusai sidang paripurna, Bambang bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiarto Teguh Widodo masuk ke ruangan Pimpinan DPR. Selain mereka, pertemuan tertutup tersebut diikuti oleh Ketua Badan Anggaran Ahamdi Noor Supit bersama Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah.

Bambang membantah bahwa pertemuan tertutup selama

satu jam itu menyinggung dana aspirasi. "Kami bahas agenda nota keuangan (RAPBN 2016)," katanya. Terkait dengan dana aspirasi, ia masih berkekuatan menolak berkomentar. Namun ia memastikan tidak ada celah memasukkan dana aspirasi jika dinilai tidak sesuai dengan mekanisme penyusunan APBN.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago secara tegas menyatakan pemerintah menolak memasukkan dana aspirasi ke RAPBN 2016. Usulan dana yang dikemas sebagai Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini dianggap bertentangan dengan Nawa Cita atau sembilan program prioritas Presiden Joko Widodo.

Tak hanya itu, kata Andrinof, Presiden menolak usulan dana ini karena tidak sesuai dengan kewenangan DPR. Legislatif, kata dia, hanya berwenang mengawasi, sementara penentuan anggaran menjadi kewenangan eksekutif. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyampaikan penolakan secara resmi ke DPR.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kemarin, juga menyatakan Presiden telah menolak dana aspirasi. Menurut dia, gagasan DPR tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah khawatir akan terjadi pembengkakan belanja APBN. "Masyarakat mulai kesusahan, pertumbuhan ekonomi kita juga tidak seperti yang diharapkan," kata Pratikno di Istana Negara, kemarin.

Gagasan pengucuran dana itu, kata dia, telah dikonsultasikan oleh pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi, Ketua Badan Anggaran Ahmad Noor Supit mengklaim Presiden dan Menteri Keuangan memberikan persetujuan. "Tidak mungkin pembahasan ini *ujug-ujug* tanpa konsultasi pemerintah," katanya.